KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	W.17-OT.02.02-99
	TANGGAL PEMBUATAN	2026-08-28
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2026-08-28
	DISAHKAN OLEH **KEPALA KANTOR WILAYAH** **HAJRIANOR**	
	NAMA SOP	**SOP UJI KONSEKUENSI DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum	1. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer 3. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mAmpu berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet 3. Printer, Scanner 4. Formulir Layanan Informasi Publik 5. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan fisik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verify

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID KEMENTERIAN	PPID SATUAN KERJA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta usulan informasi publik yang diidentifikasi sebagai informasi rahasia (informasi yang dikecualikan)	Mulai		Surat / Nota Dinas	1 hari kerja	Surat / Nota Dinas	
2	Mengumpulkan bahan informasi yang dikecualikan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja			Dasar hukum pengelolaan PPID dan Dasar hukum kearsipan	7 hari kerja	Bahan informasi yang dikecualikan	
3	Melakukan uji konsekuensi berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan atas informasi yang dikecualikan			Dasar hukum pengelolaan PPID	3 hari kerja	- Hasil Uji Konsekuensi - Berita Acara Uji Konsekuensi - Usulan daftar informasi yang dikecualikan	- Dapat dilaksanakan dalam rapat bersama antara PPID Kementerian dengan PPID Satuan Kerja; - Dapat dilaksanakan secara mandiri oleh PPID Satuan Kerja dengan unit teknis penghasil informasi.
4	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan	Selesai		Usulan daftar informasi yang dikecualikan	2 hari kerja	SK Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	